

ACEH DAN PAPUA ; DUA WAJAH KETIMPANGAN DI INDONESIA

¹Husain Abdurrahman ²Hendi Irawan

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available online Juli 2026

Email:

¹husainabdurrahman211@gmail.com

²hendiirawankesos@gmail.com

Abstrak

Paradigma pembangunan nasional di Indonesia secara historis terjebak dalam bias sentralistik yang memicu ketimpangan struktural antara wilayah pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*). Provinsi Aceh dan Papua merepresentasikan anomali pembangunan (*growth paradox*) paling nyata, di mana kekayaan sumber daya alam strategis dan kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama dua dekade gagal mentransformasi kesejahteraan sosial. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus komparatif dengan pendekatan sosiologi pembangunan dan ekonomi politik untuk membongkar akar ketimpangan sosiologis di kedua wilayah tersebut. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif-analitis serta komparatif teoretis menggunakan kerangka Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: *pertama*, industrialisasi ekstraktif masa lalu (LNG Arun di Aceh dan Freeport di Papua) beroperasi sebagai *enclave economy* yang memicu kemiskinan struktural; *kedua*, penggelontoran Dana Otsus menciptakan dependensi birokrasi (*bureaucratic dependency*) yang mematikan produktivitas sektor riil mandiri; dan *ketiga*, terjadi pembajakan anggaran oleh elite lokal (*elite capture*) serta disfungsi pembangunan teknokratis yang memicu *cultural shock* dan marginalisasi horizontal, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Studi ini menyimpulkan bahwa ketimpangan di Aceh dan Papua bukanlah masalah ekonomis matematis semata, melainkan produk dari akumulasi trauma historis, relasi kuasa yang distortif, dan kegagalan integrasi sosial-kultural.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Ketimpangan Regional, Enclave Economy, Elite Capture, Sosiologi Pembangunan, Aceh, Papua.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan nasional Indonesia secara historis terjebak dalam bias sentralistik yang memusatkan akumulasi kapital di wilayah pusat (*core*), sementara wilayah pinggiran (*periphery*) cenderung diposisikan sebagai penyokong material (Frank, 1967; Budiman, 2000). Meskipun era Otonomi Daerah telah digulirkan sejak runtuhnya Orde Baru, residu ketimpangan regional tetap menjadi persoalan struktural yang belum tuntas, di mana Provinsi Aceh dan Papua merepresentasikan "dua wajah" ketimpangan yang paling paradoks di Indonesia. Sosiologi pembangunan melihat fenomena ini bukan sekadar masalah matematis ekonomi, melainkan produk dari akumulasi trauma historis, relasi kuasa, dan benturan struktural antara kebijakan teknokratis negara dengan karakteristik sosio-kultural masyarakat lokal (Fakih, 2002). Ke dua wilayah ini memiliki kemiripan hulu sosiologis yang kuat: kaya akan sumber daya alam (SDA) strategis, memiliki memori kolektif konflik vertikal dengan pusat, dan menyandang status Daerah Otonomi Khusus (Otsus) dengan kucuran dana transfer pusat mencapai ratusan triliun rupiah selama dua dekade terakhir.

Namun, data empiris menunjukkan anomali pembangunan (*growth paradox*) yang akut di mana limpahan dana fiskal gagal mentransformasi kesejahteraan sosial secara merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Aceh secara konsisten menjadi provinsi dengan

tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, yakni mencapai 14,23%, jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,03% (BPS, 2024). Di ujung timur Indonesia, realitasnya jauh lebih ekstrem dengan wilayah Papua yang mencatatkan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, berkisar antara 26% hingga 28% (BPS, 2024). Ketimpangan sosiologis ini kian kentara pada dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di saat rata-rata nasional telah menembus angka 74 (kategori tinggi), beberapa kabupaten di pedalaman Papua masih berkutat di bawah angka 60 karena rendahnya akses Orang Asli Papua (OAP) terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan (Kemenkeu RI, 2023).

Kondisi ini memicu anomali yang membenturkan asumsi Teori Modernisasi (Rostow, 1960)—yang meyakini pembangunan infrastruktur fisik masif akan otomatis memicu efek luberan ke bawah (*trickle-down effect*)—dengan kritik Teori Ketergantungan (Dos Santos, 1970). Sejarah eksploitasi LNG Arun di Aceh dan Freeport di Papua membuktikan bahwa industrialisasi ekstraktif justru membentuk *enclave economy* (ekonomi kantong) yang mengeruk surplus kekayaan untuk pusat, namun meninggalkan kemiskinan struktural bagi masyarakat lokal (Robinson, 1986). Dalam dinamika ini, peran negara tidaklah netral karena pengalihan pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan lewat dana Otsus justru mengalami disfungsi birokrasi; distribusi anggaran yang bersifat *top-down* melahirkan fenomena *elite capture* atau pembajakan anggaran oleh elite lokal (Hadiz, 2010). Negara gagal mengantisipasi bahwa menyiramkan dana besar ke atas struktur sosial yang traumatik dan belum siap secara kultural justru menciptakan dependensi birokrasi baru serta *cultural shock* bagi masyarakat adat, sehingga studi komparatif ini krusial untuk membongkar akar ketimpangan sosiologis yang selama ini tersamarkan oleh narasi pertumbuhan ekonomi semu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegagalan efek luberan ke bawah (*trickle-down effect*)—sebagaimana diasumsikan oleh Teori Modernisasi—dapat dijelaskan melalui pembentukan ekonomi kantong (*enclave economy*) pada sejarah industrialisasi di Aceh dan Papua?
2. Mengapa kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang masif pasca-Reformasi justru memicu dependensi birokrasi (*bureaucratic dependency*) baru, bukannya memutus rantai ketimpangan struktural antara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*) di kedua wilayah tersebut?
3. Bagaimana relasi kuasa antara negara, elite politik lokal (*elite capture*), dan masyarakat adat memengaruhi pola distribusi pembangunan sehingga memperlebar ketimpangan horizontal di Aceh dan Papua?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kegagalan *trickle-down effect* dalam proyek industrialisasi masa lalu di Aceh dan Papua melalui konsep *enclave economy*.
2. Membedah anomali penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang melahirkan dependensi birokrasi baru di Aceh dan Papua dari sudut pandang Teori Ketergantungan.
3. Memetakan relasi kekuasaan antara aparaturnya negara, penetrasi kapital elite lokal, dan resistensi sosiologis masyarakat adat dalam proses distribusi pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORETIS

2.1 Teori Modernisasi

Teori Modernisasi, yang berkembang pesat pasca-Perang Dunia II, memandang pembangunan sebagai proses evolusioner, linier, dan universal yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern (Rostow, 1960). Salah satu eksponen utamanya, Walt Whitman Rostow, merumuskan lima tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) gerakan ke arah kedewasaan, dan (5) masa konsumsi tinggi.

Dalam kacamata sosiologis, teori ini mengasumsikan bahwa keterbelakangan suatu wilayah disebabkan oleh faktor-faktor internal wilayah itu sendiri, seperti budaya malas, adopsi teknologi yang rendah, institusi lokal yang tidak efisien, dan isolasi geografis (Inkeles & Smith, 1974). Solusi yang ditawarkan oleh Teori Modernisasi adalah penetrasi modal asing, transfer teknologi barat/pusat, serta pembangunan infrastruktur fisik secara masif. Teori ini percaya akan adanya *trickle-down effect* (efek luberan ke bawah), di mana pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada industri-industri besar di satu titik lambat laun akan menetes ke bawah dan memodernisasi sektor ekonomi tradisional di sekitarnya.

2.2 Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori Ketergantungan lahir sebagai antitesis radikal dan kritik langsung terhadap klaim Teori Modernisasi. Dipelopori oleh para pemikir seperti Andre Gunder Frank (1967) dan Theotonio Dos Santos (1970), teori ini berpendapat bahwa keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga atau wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*) bukanlah fase alami dari suatu proses evolusi. Sebaliknya, keterbelakangan tersebut merupakan hasil langsung dari proses ekspansi kapitalisme global dan domestik yang memosisikan wilayah pinggiran terjebak dalam eksploitasi struktural oleh wilayah pusat (*metropole/core*).

Dos Santos (1970) mendefinisikan dependensi sebagai keadaan di mana ekonomi sekelompok negara atau wilayah dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi wilayah lain yang menempatkan mereka sekadar sebagai sub-ordinat. Wilayah pinggiran dieksploitasi untuk diambil sumber daya alamnya dengan harga murah, sementara nilai tambahnya diakumulasi di pusat. Struktur ini memicu terbentuknya *enclave economy* (ekonomi kantong), sebuah kondisi di mana sebuah industri modern hadir di tengah wilayah terbelakang, namun tidak terintegrasi dengan struktur sosial ekonomi masyarakat lokal; industri tersebut hanya menjadi saluran pipa yang mengalirkan kekayaan langsung keluar dari wilayah tersebut.

2.3 Sintesis Teori: Analisis Kritis Komparatif

Menghadapkan kedua teori ini memperlihatkan benturan epistemologis yang tajam dalam sosiologi pembangunan. Teori Modernisasi cenderung bersikap ahistoris dan buta struktur; ia mendiagnosis kemiskinan sebagai kesalahan kultural dan ketidakmampuan internal subjek lokal. Akibatnya, resep yang dikeluarkan selalu bersifat teknokratis-fiskal (menambah modal, mengaspal jalan, membangun gedung).

Sebaliknya, Teori Ketergantungan memberikan pisau analisis struktural yang tajam dengan melacak faktor historisitas eksploitasi, relasi kekuasaan, dan asimetri ekonomi pusat-daerah. Namun, dalam konteks kontemporer desentralisasi Indonesia, Teori Ketergantungan klasik juga

perlu dikritisi. Jika dahulu mereka melihat eksploitasi digerakkan sepenuhnya oleh korporasi global dan negara pusat (Jakarta), realitas hari ini menunjukkan bahwa eksploitasi dan hambatan distribusi pembangunan juga diproduksi di tingkat lokal oleh para aktor elite daerah melalui pembajakan institusi demokrasi lokal (*elite capture*). Oleh karena itu, sintesis kedua teori ini diperlukan untuk melihat bagaimana penetrasi modernitas fisik (Modernisasi) beroperasi di dalam struktur ketergantungan historis yang kini direproduksi oleh elite lokal (Ketergantungan).

METODOLOGI PENULISAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif (*comparative case study*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam, kontekstual, dan holistik mengenai fenomena ketimpangan regional di dua wilayah dengan karakteristik khusus, yaitu Provinsi Aceh dan Papua.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, khususnya sosiologi pembangunan dan sosiologi ekonomi politik. Pendekatan ini memprioritaskan analisis pada aspek-aspek relasi kekuasaan, struktur sosial, modal sosial, marginalisasi, dampak sosial dari kebijakan ekonomi, serta bagaimana subjek manusia (masyarakat lokal) merespons arus pembangunan.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam paper ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur (*library research*). Sumber data sekunder meliputi rilis data resmi institusi negara (BPS, Kementerian Keuangan), jurnal ilmiah terakreditasi di Google Scholar yang membahas otonomi khusus, buku teks akademik sosiologi pembangunan, serta laporan ilmiah dari lembaga riset kebijakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-analitis dan komparatif teoretis. Data teks dan angka yang diperoleh tidak sekadar disajikan ulang, melainkan diklasifikasikan, dikonfrontasikan dengan kerangka teoretis Modernisasi dan Ketergantungan, lalu diinterpretasikan secara kritis guna menghasilkan sebuah argumentasi sosiologis yang solid mengenai akar penyebab ketimpangan di kedua daerah studi kasus.

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sejarah Industrialisasi: Proyek Vital Nasional dan Lahirnya *Enclave Economy*

Pemerintah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru, menjalankan roda pembangunan dengan kiblat utama Teori Modernisasi. Negara berasumsi bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi

nasional dapat dicapai dengan memberikan karpet merah kepada korporasi besar untuk mengelola modal dan mengeksploitasi sumber daya alam di daerah pinggiran, yang diasumsikan akan memicu *trickle-down effect* bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Rostow, 1960). Implementasi nyata dari asumsi ini dapat dilacak pada sejarah industrialisasi berskala raksasa di Aceh dan Papua.

Di Aceh, negara membangun kawasan industri berbasis gas alam cair melalui PT Arun NGL di Lhokseumawe pada tahun 1970-an. Kota Lhokseumawe seketika disulap menjadi kota industri yang sangat modern dengan fasilitas ekspatriat yang mewah, teknologi canggih, dan perputaran uang yang tinggi. Namun, jika dianalisis menggunakan Teori Ketergantungan, industrialisasi Arun tidak menghasilkan modernisasi bertahap bagi masyarakat Aceh, melainkan melahirkan *enclave economy* (Robinson, 1986). Industri LNG Arun berdiri kokoh bak pulau modern yang terisolasi dari daratan kemiskinan sosiologis di sekelilingnya. Masyarakat lokal yang mayoritas berlatar belakang agraris tradisional tidak mampu terserap ke dalam industri padat modal tersebut karena keterbatasan keterampilan formal. Keuntungan ekonomi raksasa dari gas alam tersebut langsung dialirkan ke rekening pemerintah pusat di Jakarta dan korporasi minyak asing, sedangkan masyarakat sekitar hanya mendapatkan eksternalitas negatif berupa polusi, inflasi harga lokal, dan penggusuran lahan ulayat.

Pola eksploitasi struktural yang serupa, bahkan dengan skala yang jauh lebih masif dan destruktif, terjadi di Papua melalui penandatanganan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia di Timika pada tahun 1967. Tambang Erstberg dan Grasberg merupakan salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Berdasarkan kacamata Modernisasi, kehadiran Freeport dianggap sebagai pembuka isolasi dan agen modernisasi bagi masyarakat Papua yang dianggap masih berada pada fase pra-modern. Namun, realitas sosiologis menunjukkan konfirmasi atas kritik Teori Ketergantungan (Frank, 1967). Selama berdekade-dekade, emas Papua dikuras habis untuk membangun lanskap megapolitan Jakarta dan mengakumulasi kapital global, sementara Orang Asli Papua (OAP) di sekitar lingkaran tambang Amungme dan Kamoro tersingkir dari ruang hidup mereka. Mereka mengalami marginalisasi ganda: kehilangan hak atas tanah ulayat leluhur mereka, sekaligus tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk terlibat dalam lingkaran kapitalisme modern tersebut. Ekonomi kantong Freeport menciptakan kesenjangan sosiologis yang mengerikan; kemewahan fasilitas tambang berbanding terbalik dengan angka gizi buruk dan busung lapar yang sempat melanda wilayah pedalaman Papua.

4.2 Anomali Dana Otonomi Khusus: Distribusi Fiskal dan Dependensi Birokrasi

Pasca-jatuhnya rezim Orde Baru, negara menyadari bahwa model eksploitasi struktural masa lalu telah menyulut konflik vertikal berkepanjangan (perlawanan GAM di Aceh dan OPM di Papua) yang mengancam integrasi nasional. Sebagai resolusi konflik politik, negara mengubah strateginya dengan menerapkan Otonomi Khusus (Otsus) melalui UU No. 18/2001 (untuk Aceh) dan UU No. 21/2001 (untuk Papua). Melalui kebijakan afirmasi ini, negara mengucurkan Dana Otsus yang bernilai fantastis—mencapai ratusan triliun rupiah—dengan asumsi teknokratis-modernisasi bahwa ketersediaan modal finansial yang besar akan mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga kedua wilayah tersebut dapat mengejar ketertinggalannya dari Pulau Jawa.

Namun, sosiologi pembangunan melihat terjadinya anomali besar (*growth paradox*). Mengapa dengan kucuran dana yang begitu besar, Aceh per Maret 2024 masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera (14,23%) dan Papua tetap memegang rekor kemiskinan tertinggi nasional (26-28%)?

Teori Ketergantungan kontemporer mampu menjelaskan fenomena ini melalui konsep dependensi birokrasi (*bureaucratic dependency*). Suntikan dana Otsus yang luar biasa besar tidak serta merta memutus rantai ketergantungan daerah terhadap pusat; ia justru mengubah struktur ketergantungan dari yang tadinya berbasis eksploitasi SDA menjadi ketergantungan akut terhadap transfer fiskal pusat (Kemenkeu RI, 2023).

Lebih dari 70% struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan di atas 85% APBD kabupaten/kota di Papua bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat (Otsus dan DAU/DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua wilayah ini sangat rendah karena sektor riil, industri manufaktur mandiri, dan sektor swasta tidak pernah terbangun. Perekonomian daerah mati suri dan hanya bergerak ketika anggaran pemerintah cair. Dana Otsus diposisikan sebagai "candu fiskal". Akibatnya, alih-alih melahirkan kemandirian ekonomi seperti yang dijanjikan oleh tahapan Rostow, kebijakan desentralisasi asimetris ini justru mematikan daya inovasi ekonomi lokal dan menjebak struktur sosiologis kedua daerah dalam ketergantungan administratif yang kronis pada negara pusat.

4.3 Peran Negara, Relasi Kuasa, dan Fenomena *Elite Capture*

Dalam membedah ketimpangan regional, negara tidak boleh dipandang sebagai institusi yang netral dan semata-mata berniat baik demi kesejahteraan rakyat (Evans et al., 1985). Negara adalah arena pertarungan kepentingan kelas dan relasi kekuasaan. Kegagalan pembangunan di Aceh dan Papua pasca-Otsus erat kaitannya dengan bagaimana negara membiarkan, atau bahkan memfasilitasi, terbentuknya aliansi kekuasaan baru di tingkat lokal yang mendistorsi keadilan sosial, sebuah fenomena yang dalam sosiologi politik disebut sebagai *elite capture* (Hadiz, 2010).

Di Aceh, kesepakatan damai Helsinki 2005 memicu transisi kekuasaan sosial di mana mantan kombatan politik masuk dan menguasai struktur birokrasi pemerintahan lokal melalui partai politik lokal. Namun, penguasaan birokrasi ini tidak dibarengi dengan kapasitas pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan struktural. Relasi kuasa baru ini mengonsentrasikan dana Otsus pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa berskala besar yang pengerjaannya dimonopoli oleh jaringan elite politik lokal (*re-distribution of rents*). Anggaran pembangunan habis terserap untuk membiayai ongkos birokrasi yang gemuk dan belanja pegawai, sementara program pemberdayaan ekonomi untuk petani, nelayan, dan masyarakat miskin di pedesaan Aceh hulu terabaikan. Ketimpangan di Aceh bergeser menjadi ketimpangan kelas antara elite politik birokrasi baru dengan masyarakat akar rumput.

Sementara itu di Papua, relasi kuasa berjalan lebih kompleks dan konflikual karena bersinggungan langsung dengan isu rasial, marginalisasi kultural, dan kebijakan pemekaran wilayah (Daerah Otonomi Baru/DOB). Peran negara dalam mendistribusikan pembangunan di Papua sangat bias teknokratis-geografis. Negara menggenjot pembangunan Jalan Trans-Papua ribuan kilometer dengan asumsi bahwa terbukanya konektivitas akan menurunkan harga barang dan mengintegrasikan OAP ke dalam pasar modern. Namun, analisis sosiologis membongkar bahwa struktur sosial Papua belum siap menghadapi penetrasi pasar modern yang difasilitasi negara tersebut.

Ketika jalur logistik terbuka, aktor yang paling siap mengambil keuntungan dari sirkulasi ekonomi modern tersebut adalah kaum migran (pendatang) yang memiliki modal finansial, jaringan dagang, dan literasi pasar yang lebih matang (Hadiz, 2010). Akibatnya, terjadi

ketimpangan horizontal yang tajam: sektor perdagangan modern di perkotaan dan koridor jalan baru dikuasai pendatang, sedangkan Orang Asli Papua (OAP) kian tersingkir ke sektor pertanian subsisten informal di pinggiran. Di sisi lain, elite politik lokal Papua memanfaatkan sentimen identitas kesukuan dan regulasi Otsus untuk menuntut pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten baru. Negara mengakomodasi tuntutan ini (dengan lahirnya beberapa provinsi baru di Papua), namun sosiologi pembangunan melihat pemekaran ini tidak lebih dari sekadar strategi negara untuk memecah kekuatan resistensi politik lokal sekaligus menciptakan patronase baru bagi elite birokrasi lokal Papua. Dana pembangunan habis dibagi-bagi untuk mendirikan kantor gubernur, bupati, dan menggaji aparatur birokrasi baru, sementara fasilitas puskesmas dan sekolah dasar di pedalaman pegunungan tengah tetap telantar tanpa guru dan tenaga medis.

4.4 Dampak Sosial Pembangunan: *Cultural Shock* dan Resistensi Struktural

Modernisasi fisik yang dipaksakan oleh negara di atas wilayah adat melahirkan dampak sosial yang destruktif berupa *cultural shock* (gegar budaya) dan keterasingan sosial (*alienation*), terutama bagi masyarakat asli Papua. Karakteristik sosial OAP didasarkan pada ikatan ulayat yang erat dengan alam; tanah, hutan, dan sungai bukan sekadar komoditas ekonomi ekonomi pasar, melainkan identitas kultural dan spiritual mereka. Ketika negara memaksakan konversi lahan hutan adat menjadi proyek ketahanan pangan skala besar (*Food Estate*) atau konsesi sawit raksasa, masyarakat adat dipaksa melompat dari corak produksi meramu-berburu tradisional langsung menuju corak produksi kapitalisme industri tanpa adanya jembatan adaptasi sosial.

Dampak sosialnya adalah kepunahan sistem pangan lokal, rusaknya tatanan kekerabatan adat, dan transformasi OAP dari pemilik tanah ulayat merdeka menjadi buruh harian lepas berupah murah di tanah mereka sendiri. Kondisi ketidakadilan yang berlapis ini (marginalisasi ekonomi, keterasingan budaya, ditambah dengan masih kentalnya pendekatan keamanan oleh aparat negara) memelihara api ketidakpercayaan (*distrust*) yang mendalam dari masyarakat lokal terhadap setiap proyek pembangunan yang diinisiasi oleh Jakarta. Ketimpangan regional pada akhirnya bukan lagi sekadar angka statistik kemiskinan, melainkan bermanifestasi menjadi bom waktu sosiologis yang terus mereproduksi ketegangan politik, pelanggaran HAM, dan resistensi struktural yang menghambat tercapainya kedamaian sosial yang hakiki di kedua ujung kepulauan Indonesia.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif-analitis dan komparatif teoretis yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka kesimpulan dari paper ilmiah ini adalah:

1. Kegagalan *trickle-down effect* industrialisasi masa lalu di Aceh (LNG Arun) dan Papua (Freeport) terjadi karena proyek tersebut beroperasi dalam bentuk *enclave economy* (ekonomi kantong). Industri modern padat modal tersebut gagal berintegrasi dengan struktur sosial ekonomi lokal, sehingga surplus kekayaan tersedot ke pusat dan meninggalkan kemiskinan struktural serta marginalisasi bagi masyarakat sekitar.
2. Penggelontoran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang masif pasca-Reformasi gagal memutus

rantai ketimpangan karena terjebak dalam anomali dependensi birokrasi (*bureaucratic dependency*). Suntikan dana dari atas membuat struktur fiskal daerah mengalami kecanduan kronis terhadap transfer pusat, mematikan produktivitas sektor riil mandiri, dan gagal bertransisi menjadi ekonomi daerah yang berdikari.

3. Distribusi pembangunan di Aceh dan Papua mengalami distorsi akut akibat fenomena *elite capture*, di mana relasi kekuasaan dikuasai oleh segelintir elite politik lokal yang membajak anggaran Otsus demi kepentingan akumulasi modal kelompok mereka sendiri melalui proyek birokrasi yang tidak produktif. Di Papua, pendekatan pembangunan fisik yang bias teknokratis justru memicu marginalisasi horizontal bagi Orang Asli Papua (OAP) yang kalah bersaing dengan kaum migran, serta melahirkan *cultural shock* akibat tercerabutnya masyarakat adat dari tanah ulayat mereka.

5.2 Saran (Rekomendasi Kebijakan Alternatif)

Untuk memutus lingkaran setan ketimpangan struktural di Aceh dan Papua, pemerintah pusat maupun daerah harus menghentikan paradigma pembangunan yang bias teknokratis-semen-aspal (Modernisasi klasik) dan beralih ke pendekatan pembangunan yang inklusif berpusat pada manusia (*Human-Centered Development*):

1. **Redesain Tata Kelola Dana Otsus:** Alokasi Dana Otsus harus dihentikan dari orientasi proyek fisik kontraktual dan dialihkan secara radikal (minimal 60%) untuk pembiayaan langsung jaminan kesehatan semesta, pendidikan vokasi gratis berbasis potensi lokal, serta pemberian modal langsung bagi pelaku ekonomi usaha mikro kecil di tingkat kampung/desa.
2. **Dekonsentrasi Kekuasaan dan Pemberdayaan Hak Adat:** Negara wajib memberikan pengakuan hukum yang mutlak terhadap tanah ulayat masyarakat adat di Papua dan menghentikan izin konsesi ekstraktif skala besar yang merusak ruang hidup komunal. Setiap desain pembangunan harus melibatkan dewan adat lokal (seperti MRP di Papua atau Lembaga Adat Panglima Laot/Wali Nanggroe di Aceh) sejak tahap perencanaan, bukan menempatkan mereka sekadar sebagai penonton pasif.
3. **Penguatan Sektor Riil Non-SDA Konton:** Aceh dan Papua harus didorong untuk membangun hilirisasi industri berbasis potensi lokal (seperti pertanian kopi, coklat, perikanan kelautan, dan ekowisata berbasis komunitas) agar daerah dapat melepaskan diri dari dependensi birokrasi anggaran pusat dan menciptakan lapangan kerja formal yang inklusif bagi generasi muda lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dos Santos, T. (1970). The Structure of Dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231-236.

-
- Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. New York: Monthly Review Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Inkeles, A., & Smith, D. H. (1974). *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Evaluasi Kinerja Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.